



BUPATI MAMUJU UTARA
PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN FORMALPADA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta untuk optimalisasi penyelenggaraan pendidikan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formalpada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 214 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind0onesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 153) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.

3. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara.
6. Satuan Pendidikan Formalselanjutnya disingkat SPF adalah Satuan Pendidikan SD dan Satuan Pendidikan SMP.
7. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah SMP pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
8. Sekolah Dasar selanjutnya disingkat SD adalah SD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
9. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja yang melaksanakan tugas teknis operasional pada Satuan Pendidikan SD dan Satuan Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara.
10. Kepala UPTSPF adalah Kepala UPTSPFSD dan Satuan Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian, keterampilan dan profesi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTSPFSD dan UPT SPF SMP pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (2) UPT SPFSD sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) UPT SPFSMP sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT SPF SD dan UPT SPF SMP adalah merupakan UPT pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (2) UPT SPF SD dan UPT SPF SMP dipimpin oleh seorang Kepala yang secara administratif bertanggungjawab kepada

Sekretaris dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTSPFSD terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTSPFSMP terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Kepala UPT SPFSD dijabat oleh Pejabat Fungsional Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT SPFSD.
- (4) Kepala UPT SPF SMP dijabat oleh Pejabat Fungsional Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT SPF SMP.
- (5) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (6) Bagan Susunan Organisasi UPTSPF SD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Bagan Susunan Organisasi UPT SPF SMP sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian kesatu Kepala

Pasal 5

Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam hal penyelenggaraan program pendidikan formal pada satuan pendidikan bersangkutan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja UPTSPF bersangkutan;
- b. Pelaksanaan program pendidikan formal SPF bersangkutan;

- c. Penetapan sasaran berdasarkan skala prioritas penyelenggaraan pendidikan formal pada satuan pendidikan bersangkutan;
- d. Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pelaksanaan urusan pendidikan pada satuan pendidikan bersangkutan;
- e. Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) pada satuan pendidikan bersangkutan;
- f. Penyusunan capaian kinerja penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan bersangkutan;
- g. Pembinaan jabatan fungsional dalam penyelenggaraan pendidikan formal pada satuan pendidikan bersangkutan;
- h. Penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan formal pada satuan pendidikan bersangkutan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan dan menyusun perencanaan dan kegiatan UPTSPF bersangkutan;
- b. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan kegiatan UPTSPF bersangkutan;
- c. Melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, inventarisasi, kerumahtanggaan dan pelaporan pada SPF bersangkutan;
- d. Melaksanakan perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana SPF bersangkutan;
- e. Melaksanakan pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan teknis dan administrasi pada SPF bersangkutan;
- f. Memfasilitasi pembinaan karir jabatan fungsional tertentu;
- g. Menyusun laporan kegiatan ketatausahaan UPT pada SPF bersangkutan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 8 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Tertentu Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Tertentu diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTSPF berkewajiban memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan pejabat fungsional tertentu dan aparat pelaksana UPTSPF bersangkutan.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTSPF bersangkutan.
- (3) Pejabat Fungsional Tertentu Keahlian dan Terampil di bidang pendidikan dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Tertentu senior yang bertindak selaku koordinator berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTSPF bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTSPF berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan UPTSPF bersangkutan maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Koordinator Jabatan Fungsional tertentu berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPT, Kepala Urusan Tata Usaha, Koordinator Jabatan Fungsional tertentu masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Jabatan Kepala UPTSPF tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTSPF berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPT dapat menunjuk Kepala Urusan Tata Usaha untuk mewakilinya;

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

Kepala UPT dan Kepala Urusan Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 15 Desember 2017

BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

Ttd

M. NATSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 46

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR : 46 TAHUN 2017
TAHUN : 15 DESEMBER 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAHRAGA.

UPT SPF SDPADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

1. UPTSPFSD Sarudu 1;
2. UPTSPFSD Sarudu 2;
3. UPTSPFSD Sarudu 3;
4. UPTSPFSD Sarudu 4;
5. UPTSPFSD Sarudu 5;
6. UPTSPFSD Sarudu 6;
7. UPTSPFSD Sarudu 7;
8. UPTSPFSD Sarudu 8;
9. UPTSPFSD Sarudu 9;
10. UPTSPFSD Sarudu 10;
11. UPTSPFSD Dapurang 1;
12. UPTSPFSD Dapurang 2;
13. UPTSPFSD Dapurang 3;
14. UPTSPFSD Dapurang 4;
15. UPTSPFSD Dapurang 5;
16. UPTSPFSD Dapurang 6;
17. UPTSPFSD Dapurang 7;
18. UPTSPFSD Dapurang 8;
19. UPTSPFSD Dapurang 9;
20. UPTSPFSD Dapurang 10;
21. UPTSPFSD Dapurang 11;
22. UPTSPFSD Dapurang 12;
23. UPTSPFSD Dapurang 13;
24. UPTSPFSD Dapurang 14;
25. UPTSPFSD Duripoku 1;
26. UPTSPFSD Duripoku 2;
27. UPTSPFSD Duripoku 3;
28. UPTSPFSD Duripoku 4;
29. UPTSPFSD Duripoku 5;
30. UPTSPFSD Duripoku 6;
31. UPTSPFSD Baras 1;
32. UPTSPFSD Baras 2;

33. UPTSPFSD Baras 3;
34. UPTSPFSD Baras 4;
35. UPTSPFSD Baras 5;
36. UPTSPFSD Baras 6;
37. UPTSPFSD Baras 7;
38. UPTSPFSD Baras 8;
39. UPTSPFSD Baras 9;
40. UPTSPFSD Baras 10;
41. UPTSPFSD Baras 11;
42. UPTSPFSD Baras 12;
43. UPTSPFSD Baras 13;
44. UPTSPFSD Baras 14;
45. UPTSPFSD Baras 15;
46. UPTSPFSD Baras 16;
47. UPTSPFSD Baras 17;
48. UPTSPFSD Baras 18;
49. UPTSPFSD Baras 19;
50. UPTSPFSD Baras 20;
51. UPTSPFSD Baras 21;
52. UPTSPFSD Baras 22;
53. UPTSPFSD Bulu Taba 1;
54. UPTSPFSD Bulu Taba 2;
55. UPTSPFSD Bulu Taba 3;
56. UPTSPFSD Bulu Taba 4;
57. UPTSPFSD Bulu Taba 5;
58. UPTSPFSD Bulu Taba 6;
59. UPTSPFSD Bulu Taba 7;
60. UPTSPFSD Bulu Taba 8;
61. UPTSPFSD Bulu Taba 9;
62. UPTSPFSD Bulu Taba 10;
63. UPTSPFSD Bulu Taba 11;
64. UPTSPFSD Bulu Taba 12;
65. UPTSPFSD Lariang 1;
66. UPTSPFSD Lariang 2;
67. UPTSPFSD Lariang 3;
68. UPTSPFSD Lariang 4;
69. UPTSPFSD Lariang 5;
70. UPTSPFSD Lariang 6;

71. UPTSPFSD Lariang 7;
72. UPTSPFSD Lariang 8;
73. UPTSPFSD Lariang 9;
74. UPTSPFSD Pasangkayu 1;
75. UPTSPFSD Pasangkayu 2;
76. UPTSPFSD Pasangkayu 3;
77. UPTSPFSD Pasangkayu 4;
78. UPTSPFSD Pasangkayu 5;
79. UPTSPFSD Pasangkayu 6;
80. UPTSPFSD Pasangkayu 7;
81. UPTSPFSD Pasangkayu 8;
82. UPTSPFSD Pasangkayu 9;
83. UPTSPFSD Pasangkayu 10;
84. UPTSPFSD Pasangkayu 11;
85. UPTSPFSD Pasangkayu 12;
86. UPTSPFSD Pasangkayu 13;
87. UPTSPFSD Pasangkayu 14;
88. UPTSPFSD Pasangkayu 15;
89. UPTSPFSD Pasangkayu 16;
90. UPTSPFSD Pasangkayu 17;
91. UPTSPFSD Tikke Raya 1;
92. UPTSPFSD Tikke Raya 2;
93. UPTSPFSD Tikke Raya 3;
94. UPTSPFSD Tikke Raya 4;
95. UPTSPFSD Tikke Raya 5;
96. UPTSPFSD Tikke Raya 6;
97. UPTSPFSD Tikke Raya 7;
98. UPTSPFSD Tikke Raya 8;
99. UPTSPFSD Tikke Raya 9;
100. UPTSPFSD Tikke Raya 10;
101. UPTSPFSD Tikke Raya 11;
102. UPTSPFSD Tikke Raya 12;
103. UPTSPFSD Tikke Raya 13;
104. UPTSPFSD Tikke Raya 14;
105. UPTSPFSD Tikke Raya 15;
106. UPTSPFSD Tikke Raya 16;
107. UPTSPFSD Tikke Raya 17;
108. UPTSPFSD Tikke Raya 18;

109. UPTSPFSD Tikke Raya 19;
110. UPTSPFSD Tikke Raya 20;
111. UPTSPFSD Tikke Raya 21;
112. UPTSPFSD Pedongga 1;
113. UPTSPFSD Pedongga 2;
114. UPTSPFSD Pedongga 3;
115. UPTSPFSD Pedongga 4;
116. UPTSPFSD Pedongga 5;
117. UPTSPFSD Bambalamotu 1;
118. UPTSPFSD Bambalamotu 2;
119. UPTSPFSD Bambalamotu 3;
120. UPTSPFSD Bambalamotu 4;
121. UPTSPFSD Bambalamotu 5;
122. UPTSPFSD Bambalamotu 6;
123. UPTSPFSD Bambalamotu 7;
124. UPTSPFSD Bambalamotu 8;
125. UPTSPFSD Bambalamotu 9;
126. UPTSPFSD Bambalamotu 10;
127. UPTSPFSD Bambalamotu 11;
128. UPTSPFSD Bambalamotu 12;
129. UPTSPFSD Bambalamotu 13;
130. UPTSPFSD Bambalamotu 14;
131. UPTSPFSD Bambalamotu 15;
132. UPTSPFSD Bambalamotu 16;
133. UPTSPFSD Bambalamotu 17;
134. UPTSPFSD Bambalamotu 18;
135. UPTSPFSD Bambalamotu 19;
136. UPTSPFSD Bambalamotu 20;
137. UPTSPFSD Bambalamotu 21;
138. UPTSPFSD Bambaira 1;
139. UPTSPFSD Bambaira 2;
140. UPTSPFSD Bambaira 3;
141. UPTSPFSD Bambaira 4;
142. UPTSPFSD Bambaira 5;
143. UPTSPFSD Bambaira 6;
144. UPTSPFSD Bambaira 7;
145. UPTSPFSD Bambaira 8;
146. UPTSPFSD Bambaira 9;

147. UPTSPFSD Bambaira 10;
148. UPTSPFSD Bambaira 11;
149. UPTSPFSD Sarjo 1;
150. UPTSPFSD Sarjo 2;
151. UPTSPFSD Sarjo 3;
152. UPTSPFSD Sarjo 4;
153. UPTSPFSD Sarjo 5;
154. UPTSPFSD Sarjo 6;
155. UPTSPFSD Sarjo 7; dan
156. UPTSPFSD Sarjo 8.

BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

H. AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR : 46 TAHUN 2017
TAHUN : 15 DESEMBER 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SPF PADA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA.

UPT SPF SMPPADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

1. UPTSPF SMP Sarudu 1;
2. UPTSPF SMP Sarudu 2;
3. UPTSPF SMP Sarudu 3;
4. UPTSPF SMP Sarudu 4;
5. UPTSPF SMP Dapurang 1;
6. UPTSPF SMP Dapurang 2;
7. UPTSPF SMP Dapurang 3;
8. UPTSPF SMP Dapurang 4;
9. UPTSPF SMP Dapurang 5;
10. UPTSPF SMP Duripoku;
11. UPTSPF SMP Baras 1;
12. UPTSPF SMP Baras 2;
13. UPTSPF SMP Baras 3;
14. UPTSPF SMP Baras 4;
15. UPTSPF SMP Bulu Taba 1;
16. UPTSPF SMP Bulu Taba 2;
17. UPTSPF SMP Bulu Taba 3;
18. UPTSPF SMP Bulu Taba 4;
19. UPTSPF SMP Lariang 1;
20. UPTSPF SMP Lariang 2;
21. UPTSPF SMP Lariang 3;
22. UPTSPF SMP Pasangkayu 1;
23. UPTSPF SMP Pasangkayu 2;
24. UPTSPF SMP Pasangkayu 3;
25. UPTSPF SMP Pasangkayu 4;
26. UPTSPF SMP Tikke Raya 1;
27. UPTSPF SMP Tikke Raya 2;
28. UPTSPF SMP Pedongga;
29. UPTSPF SMP Bambalamotu 1;
30. UPTSPF SMP Bambalamotu 2;
31. UPTSPF SMP Bambalamotu 3;
32. UPTSPF SMP Bambalamotu 4;

33. UPTSPF SMP Bambalamotu 5;
34. UPTSPF SMP Bambalamotu 6;
35. UPTSPF SMP Bambalamotu 7;
36. UPTSPF SMP Bambaira 1;
37. UPTSPF SMP Bambaira 2;
38. UPTSPF SMP Sarjo 1; dan
39. UPT Dinas SPF SMP Sarjo 2.

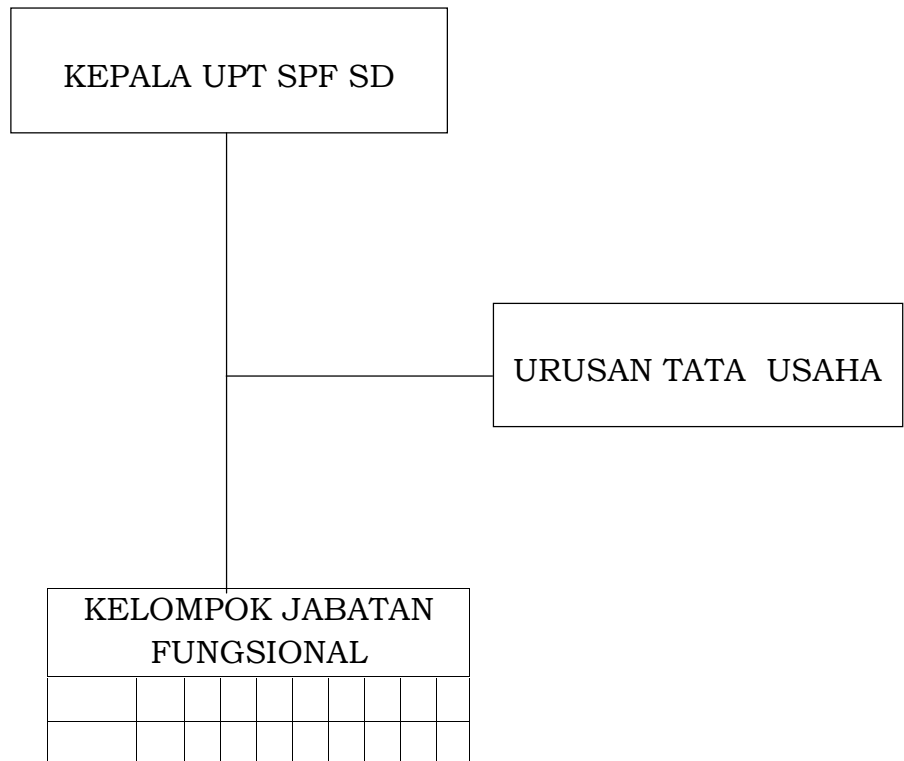
BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
 NOMOR : 46 TAHUN 2017
 TAHUN : 15 DESEMBER 2017
 TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN
 PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
 DAN OLAHRAGA.

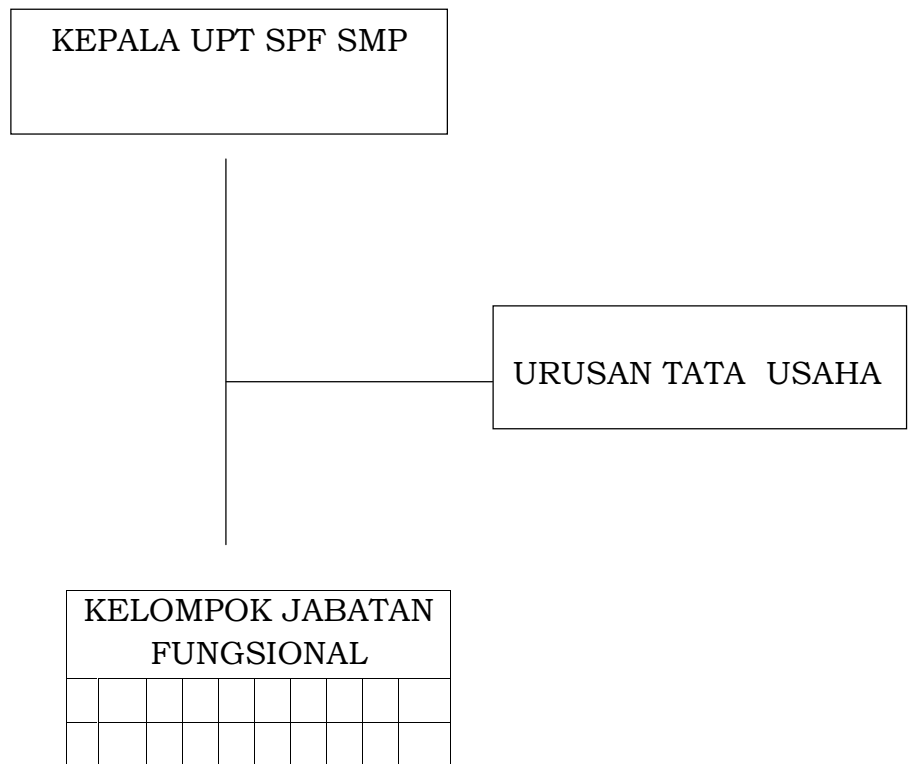
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 UPT SPF SD PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA



BUPATI MAMUJU UTARA,
 Ttd
 AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
 NOMOR : 46 TAHUN 2017
 TAHUN : 15 DESEMBER 2017
 TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN
 PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
 DAN OLAHRAGA.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 UPT SPF SMP PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**



BUPATI MAMUJU UTARA,
 Ttd
 H. AGUS AMBO DJIWA